

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS SOSIAL PENGENDALAIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Tujuan: Tersedianya Layanan bagi	- Jumlah anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus sebanyak 7 orang - Jumlah Anak Perempuan yang mendapatkan perlindungan khusus 4 org - Jumlah Anak laki-laki yang mendapatkan perlindungan khusus 3 org - Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam	Akses - Masih minimnya KIE terhadap penyediaan layanan AMPK Partisipasi - Masih rendahnya anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan perlindungan Kontrol - Belum adanya sarana atau saluran dalam permasalahan bagi AMPK - Tidak adanya koordinasi antara aparaturnya terkait dalam pelaksanaan layanan AMPK Manfaat - Anak yang memerlukan perlindungan khusus belum mendapatkan	- Keterbatasan kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kegiatan belum responsif gender. - Terbatasnya media informasi dan sosialisasi - Kurangnya pengawasan terhadap kondisi kantor - Belum tersedianya unit khusus yang melayani AMPK - Forum Anak belum Optimal dalam menjadi Pelapor dan Pelopor - Budaya malu	- Pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam memperoleh layanan bagi AMPK - Pemahaman Tokoh Masyarakat yang masih rendah dalam menyokong masyarakat yang membutuhkan layanan. - Perencana dan Pelaksana pembangunan belum responsif gender.	- Tersedianya layanan bagi AMPK yang responsif dan inklusif bagi semua.	- Sosialisasi tentang Layanan yang disediakan bagi AMPK. - Mendorong percepatan terwujudnya UPTD bagi Layanan AMPK	Terwujudnya layanan bagi AMPK.i	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Input : Rp.120.000.00 0,- Output : Jumlah anak yang

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
AMPK.	pemberian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	pelayanan secara optimal. Manfaat yang diperoleh bagi anak belum secara inklusif						mendapatkan layanan perlindungan khusus Outcome : Tersedianya layanan bagi AMPK

Padang Panjang, Maret 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Perlindungan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang



Drs. Osman Bin Nur, M.Si
NIP. 19690120 198902 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS SOSIAL PENGENDALAIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya kegiatan pembangunan yang responsif gender	Sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 67 Tahun 2011, Perwako No. 26 Tahun 2018 Jumlah Anggaran APBD Kota Padang Panjang Rp. 105.000.000,- Belum seluruh OPD membuat anggaran yang responsif gender	Akses : Tidak tersedianya Media Informasi tentang PUG Komitmen Kepala OPD Terbatas SDM dalam menyusun ARG Kontrol Mutasi Petugas Belum optimal pengawasan pelaksanaan PPRG Manfaat Belum seluruh OPD memahami PUG	Sering terjadi mutasi dan rotasi Kurangnya dukungan dari pimpinan Tempat pelatihan kurang menarik Dukungan pimpinan belum Optimal	Sering terjadi mutasi dan rotasi Kurangnya dukungan dari pimpinan Tidak adanya punishment dan reward Kurangnya kesempatan perempuan mengikuti diklat	Terwujudnya Pembangunan yang Responsif Gender	Penguatan kelembagaan PUG uang terdiri dari : Melaksanakan Pelatihan PUG, GAP/GBS bagi PPRG, Focal Point dan PUG bagi masyarakat Mengoptimalkan Focal Point Membuat regulasi untuk pelaksanaan PUG	Sesuai dengan inpes No 9 tahun 2000 dan Permendagri No 67 Tahun 2011, Perwako No. 26 tahun 2018 Seluruh OPD sudah mengacu pada PPRG	Outcome : Tersedianya layanan bagi AMPK Kegiatan 1 Pelaksanaan Pelatihan PUG/PPRG dan GAP/GBS Input : Rp. 74.000.000,- Output : Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan PUG/PPRG, GAP/GBS, PUG bagi masyarakat Outcome : Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Tujuan Kegiatan: Terpuhinya Kegiatan pembangunan yang responsif gender	Pembangunan yang tidak responsif gender mempunyai damoak terhadap kualitas pembangunan contoh Trotoar kecil tidak aman untuk jalan kaki, WC pada pelayanan public	Meningkatkan SDM OPD dalam membuat perencanaan yang responsif gender						Kegiatan 2 : Pembuatan Profil Gender dan Anak Output: Jumlah Buku Profil yang dicetak Outcome: Tersedianya informasi data terpilah untuk perencanaan Pembangunan

Padang Panjang, Maret 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang



Drs. Osman Bin Nur, M.Si
NIP. 19690120 198902 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS SOSIAL PENGENDALAIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi disabilitas, lansia dan penanganan penyandang penyakit sosial	Sesuai dengan amanat MDGs tahun 2015 yang ditindaklanjutan dengan SDGs 2030 bahwa pendidikan harus dapat diberlakukan untuk semua kelompok Penyandang Disabilitas pada tahun 2023 adalah sebanyak 403 orang terdiri dari 237 laki-laki dan 166 orang perempuan Sebagian besar penyandang disabilitas tidak mendapatkan penghidupan yang layak.	Akses : Sarana prasarana bagi penyandang disabilitas sangat terbatas sehingga ruang geraknya jadi terbatas Minimnya kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas Perasaan malu memiliki anggota keluarga penyandang cacat Partisipasi: Kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas Belum maksimal koordinasi dengan kab/kota tentang penyediaan data penyandang disabilitas Belum optimal program pembinaan para penyandang netra	Belum mkaksimalnya dukungan terhadap penyandang disabilitas Stigma masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak akan bisa melakukan aktifitas layaknya orang normal Minimnya peran masyarakat untuk mengoptimalkan (memberdayakan) disabilitas	Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas Membentuk kelompok usaha penyandang disabilitas netra yang produktif Memonitor dan evaluasi usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra Meningkatkan koordinasi OPD Provinsi serta kab/kota	Penyandang Disabilitas pada tahun 2023 adalah sebanyak 403 orang terdiri dari 237 laki-laki dan 166 orang perempuan Pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada penyandang disabilitas Peningkatan SDM pengelola PPDI	Outcome: Tersedianya informasi data terpilah untuk perencanaan Pembangunan Sub Kegiatan 1 Pemberian bimbingan fisik, mental, spriritual dan sosial Input : Rp.800.000.000,- Output 1 : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pangan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan	Kontrol : Belum terlibatnya disabilitas dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan Manfaat : Belum seluruh disabilitas merasakan pembangunan		Kurangnya kesempatan perempuan mengikuti diklat		Bimbingan lanjut kepada usaha yang dikelola penyandang disabilitas Sosialisasi pemberdayaan para penyandang disabilitas	Pendidikan dan pelatihan bagi disabilitas	Output 2 : Persentase penyandang penyakit sosial yang tertangani Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi disabilitas, lansia dan penanganan penyakit sosial

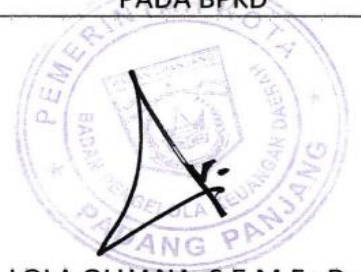
Padang Panjang, Maret 2024
**Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Perlindungan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang**



Drs. Osman Bin Nur, M.Si
NIP. 19690120 198902 1 001

PENELAAHAN DOKUMEN GAP GBS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH TIM PENGGERAK / DRIVER PPRG BAGI

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABID PMSOSBUDPEM PADA BAPPEDA	IRBAN WILAYAH ii PADA INSPEKTORAT	KABID ANGGARAN PADA BPKD	KABID PPPA PADA DINAS SOSIAL PPKBPPPA
 ANTONI ARIF,ST,M.CIO NIP. 19800906 201101 1 002	 YONHENDRIL,SE,Akt.Msi NIP. 19740614 199903 1 005	 LOLA OLHANA, S.E.M.Ec.Dev NIP. 19790811 200212 2 003	 FAIZIL WARDAH,S.Si,ME NIP. 19741111 200212 2 004